

LAPORAN KINERJA 2018



Pemerintah Provinsi Jambi
DINAS PERKEBUNAN

Jl. M. Yusuf Singedikane No. 01 Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 62596, Fax (0741) 60561
Email : disbunprovjambi@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2018 merupakan gambaran tentang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 yang bersumber dana APBN. Disamping itu laporan ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk mengevaluasi berbagai kekurangan yang akan menjadi dasar bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Penyajian Laporan Kinerja ini mungkin belum dapat mengakomodir berbagai kebutuhan informasi bagi semua pihak, namun demikian berbagai masukan dan sumbang saran dari pembaca, diharapkan dapat menjadi bahan yang berguna untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah turut membantu dan bekerjasama sehingga dapat tersusunnya buku Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2018.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi stakeholder perkebunan maupun pemerintah, dan masyarakat pada umumnya.

Jambi, Januari 2019
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAMBI



Ir. AGUSRIZAL, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640819198503 1007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar belakang.....	1
1.2.Perekonomian	5
BAB II. KONDISI UMUM KEDINASAN	7
2.1. Kelembagaan Dinas Perkebunan.....	7
2.2. Kepegawaian Dinas Perkebunan.....	20
2.3. Perencanaan dan Evaluasi.....	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Pengukuran kinerja Program dan Kegiatan	24
3.2 Keuangan	29
BAB IV. PENUTUP	31
4.1. Kesimpulan	31
4.2 Saran	32

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. PDRB Sektor Pertanian dan Kehutanan di Provinsi Jambi atas dasar Harga berlaku keadan tahun 2013 – 2017.....	6
2. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.....	20
3. Jumlah Aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan kepangkatan keadaan s/d akhir tahun 2018	20
4. Jumlah aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menurut tingkat Pendidikan keadaan s/d akhir tahun 2018	21
5. Kelengkapan Sarana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.....	22
6. Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun tahun 2018.....	30

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.....	19
--	----

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2018 merupakan tahun ke tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Periode 2016 - 2021. Visi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang telah ditetapkan didalam RPJMD adalah “ **Jambi TUNTAS 2021** “ yaitu **”Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera”**. Dalam upaya mewujudkan Visi itu maka ditetapkanlah **Misi** Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021, yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastuktur umum, pengelolaan energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Selanjutnya Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016 - 2021 khususnya terkait dengan pembangunan sub sektor Perkebunan, maka Dinas Perkebunan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi Jambi untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Mengacu kepada Visi dan Misi pembangunan provinsi Jambi untuk 5 (lima) tahun kedepan, maka pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk periode tahun 2016-2021 adalah mendukung *terwujudnya pencapaian Misi 1, Misi 4 dan Misi 5* yang telah tertuang didalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dalam rangka mensukseskan pencapaian Jambi TUNTAS 2021.

Dalam upaya mendukung terwujudnya sasaran Misi 1, maka upaya yang ditempuh oleh dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah meningkatkan kualitas Sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Latihan, penyediaan sarana prasarana aparatur serta Sistem Kebersamaan Ekonomi yang akan ditempuh melalui 4 program non teknis, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur; Peningkatan disiplin aparatur; dan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;. Sedangkan untuk mendukung terwujudnya Misi 4, dan Misi 5 pembangunan Provinsi Jambi, maka upaya yang ditempuh oleh dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah :

1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan yang berorientasi pada agribisnis melalui pengembangan komoditi unggulan dan potensial.
2. Meningkatkan penggunaan bibit unggul komoditi perkebunan, serta pengawasan peredaran benih dan sarana input.
3. Meningkatkan kemandirian dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman Perkebunan.
4. Meningkatkan kualitas SDM pekebun melalui pelatihan teknis dan pemberdayaan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE).
5. Meningkatkan Penerapan Teknologi Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di areal perkebunan rakyat.

7. Meningkatkan koordinasi dalam mengendalikan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) serta kebakaran lahan kebun.
8. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif untuk menarik minat investor dalam pengembangan perkebunan.
9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha Perkebunan.

Berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tersebut telah ditetapkan Visi dan Misi Pembangunan Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : **“ Terwujudnya Perkebunan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Menuju Jambi Tuntas 2021 ”**

Upaya mewujudkan Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, maka ditetapkan Misi yaitu :

1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan yang berorientasi pada agribisnis melalui pengembangan komoditi unggulan dan potensial.
2. Meningkatkan Penerapan Teknologi Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang administrasi dan manajemen kelembagaan.

Pada tahun 2017, upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan misi pembangunan perkebunan tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang didanai APBN adalah program utama pembangunan perkebunan yaitu : **Program peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan.**

Program dan Kegiatan tahun anggaran 2018 didanai APBN. terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 2.137.800.000,00,- dan dana Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp. 23.594.334.000,00,-. Pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2018 terus mengupayakan mendorong peningkatan luas areal dan produksi komoditas perkebunan. Tahun 2017 **Luas areal perkebunan** tercatat seluas 1.936.145 Ha, bila dibandingkan

dengan tahun 2016, dengan luas areal 1.580.733 Ha, maka terjadi **peningkatan sebesar 6,44 %**. Distribusi luasan komoditas perkebunan tahun 2017 masih didominasi oleh 7 (tujuh) komoditi unggulan yaitu karet 673.350 Ha, kelapa sawit 1.039.920 Ha, kelapa 118.695 Ha, cassiavera 45.924 Ha, kopi 27.166 Ha, pinang 20.985 Ha, kakao 2.432 Ha, dan komoditi lainnya 7.673 Ha.

Sementara itu produksi selama tahun 2017 secara umum juga mengalami sedikit kenaikan bila dibandingkan dengan produksi selama Tahun 2016. **Total produksi komoditas perkebunan** pada Tahun 2017 mencapai 2.234.349 ton dan pada Tahun 2016 sebesar 2.158.024 ton yang berarti mengalami **kenaikan sebesar 3,0 %**. Kenaikan Produksi tersebut diakibatkan oleh ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan produksi seperti Karet Kelapa Sawit, Kelapa dalam, Kopi, Casiavera dan Pinang , hal ini terjadi karena ada penambahan luas area tanam seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kelapa memberikan kontribusi langsung terhadap pertambahan jumlah produksi.

Adapun capaian produksi komoditi perkebunan tahun 2017 meliputi karet 341.313 ton, kelapa sawit 1.683.532 ton, dan kopi 14.323 ton, cassiavera 56.681 ton, pinang 13.395 ton, kakao 802 ton nilam 295 ton, tembakau 317 ton dan tebu 9.655 ton.

1.2. Perekonomian

Sub sektor Perkebunan memberikan kontribusi yang cukup besar pada laju perkembangan ekonomi di Provinsi Jambi. Beberapa produk dan hasil olahan komoditas perkebunan diekspor dengan negara tujuan Malaysia, Singapura, USA, Jepang dan lain-lain. Nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2017 terus mengalami peningkatan yang, baik volume maupun nilai ekspor bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dihasilkan dari ekspor komoditi karet, kelapa sawit (CPO), kelapa (kelapa butir, kopra dan minyak kelapa mentah), kopi, pinang dan lain-lain.

Volume ekspor komoditi perkebunan pada tahun 2017 tercatat sebesar 928.067.254 ton dengan nilai ekspor mencapai US \$ 1.438.504.243,70,-, bila dibandingkan dengan tahun 2016 volume ekspor mencapai 748.886,518 ton dengan nilai ekspor US \$ 1.162.543.054,97,-, maka mengalami kenaikan sebesar 24,0 %.

Nilai ekspor ini berdampak positif terhadap penerimaan devisa, selain itu juga tentunya berperan dalam meningkatkan pendapatan petani pekebun. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor Perkebunan cenderung meningkat pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku pada 5 tahun terakhir disajikan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. PDRB Sektor Pertanian dan Kehutanan di Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Keadaan Tahun 2011 – 2016 (dalam jutaan rupiah). Tahun dasar 2010.

NO	LAPANGA USAHA	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	33,312,291.6	37,967,924.2	43,793,238.6	51,148,503.1	56,199,421.2
2	Pertanian, Peternakan, Perburuhan dan Jasa Pertanian	29,314,865.2	33,117,948.8	38,141,366.1	44,921,108.7	49,628,510.1
3	Tanaman Pangan	3,315,429.7	3,602,657.3	3,911,979.4	4,297,568.1	4,383,060.3
4	Tanaman Holtikultura	4,091,586.5	4,849,229.1	5,405,993.9	6,343,663.3	6,647,145.3
5	Tanaman Perkebunan	19,927,344.4	22,482,722.9	26,339,116.0	31,527,871	35,679,166.3
6	Peternakan	1,605,077.6	1,814,917.1	2,089,384.1	2,279,693.2	2,408,276.8
7	Jasa Pertanian dan Perburuan	375,427.0	369,177.8	394,892.8	472,313.2	510,861.5
8	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,555,367.1	1,834,917.1	2,119,458.8	2,266,483.6	2,295,899.8
9	Perikanan	2,442,059.2	3,015,058.2	3,532,413.6	3,960,910.8	4,275,011.4
10	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	129,976,040.5	144,814,418.3	155,065,656.0	171,654,184.1	191,098,712
11	PDRB SEKTOR PERKEBUNAN	19,927,344.4	22,482,722.9	26,339,116.0	31,527,871.0	35,679,166.3
12	KONTRIBUSI PERKEBUNAN TERHADAP PDRB PROVINSI JAMBI	15.3	15.5	17.0	18.4	18.7
13	KONTRIBUSI PERKEBUNAN TERHADAP PDRB PERTANIAN	59.82	59.22	60.14	61.64	63.49

Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (BPS)

Dari tabel diatas terlihat bahwa kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Sektor Pertanian dan Kehutanan maupun Provinsi Jambi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2013-2017) cenderung meningkat. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian tahun 2017 sebesar Rp. 56.199.421,2,- bila dibandingkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 51.148.503.1,- atau meningkat 9,01 %. Dimana PDRB sektor perkebunan terhadap PDRB sektor Pertanian tahun 2017 sebesar Rp.35.679.166.3,- bila dibandingkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 31.527.871,- maka meningkat sebesar 12,36 %, selanjutnya sektor Perkebunan memberikan kontribusi terhadap PDRB sector Pertanian pada tahun 2017 mencapai 63,49 % dan bila dibandingkan tahun 2016 tercatat 61,64 % maka meningkat sebesar 2,0 %. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan sub sektor perkebunan dalam menggerakkan perekonomian di Propinsi Jambi.

BAB II. KONDISI UMUM

2.1. Kelembagaan Dinas Perkebunan

Mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 43 Tahun 2016, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas pokok, yakni ; **membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah di bidang perkebunan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan.
- c. Pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan supervisi di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan.
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perkebunan.

- f. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD yang terkait.
- g. Penyampaian laporan sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui sekretaris daerah dan,
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya Kepala Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 1 bagian Sekretariat dan 4 bidang teknis serta 2 UPTD, sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

2.1.1. Sekretariat

Tugas pokoknya adalah ; membantu dinas dalam rangka pengoordinasian, penyiapan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, dan administrasi umum serta kepegawaian lingkup dinas dan sekretariat.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Penyusunan perencanaan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi serta keuangan dan aset.
- b. Pelaksanaan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi serta keuangan dan aset.
- c. Pengawasan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi serta keuangan dan aset.
- d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi dan keuangan dan aset.
- e. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan anggaran pembangunan.

- f. Pengaturan tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang lain dan UPTD.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat dibantu oleh ;

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah membantu Sekretariat dalam rangka pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Pengelolaan system kearsipan, barang inventaris dinas dan perpustakaan
- b. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas, dan Penyelenggaraan rapat-rapat, upacara, protokoler dan kehumasan
- c. Penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa rumah tangga dinas.
- d. Pengelolaan dan memproses mutasi, kartu pegawai, pensiun, cuti dan urusan kesejahteraan pegawai
- e. Penyusunan daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
- f. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan tata laksana dinas.
- g. Penyediaan dan meningkatkan kompetensi pejabat fungsional.
- h. Penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- i. Pemfasilitasian pengumpulan daftar usulan penilaian angka kredit (DUPAK) Pejabat fungsional.
- j. Penyediaan dan peningkatan kompetensi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perkebunan, penilai usaha perkebunan dan petugas penilai analisis dampak lingkungan (AMDAL).
- k. Penyusunan kebutuhan diklat penjenjangan dan teknis PNS.

- l. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan disiplin pegawai.
- m. Pelaksanaan pembinaan jasmani, rohani dan PNS.
- n. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan.
- o. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan subag umum dan kepegawaian sebagai pertanggungjawaban dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub. Bagian Program dan Evaluasi

Tugas Subbagian Program dan Evaluasi adalah membantu sekretariat dalam rangka penyiapan dan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan lingkup sekretariat dan dinas.

Sedangkan fungsi Subbagian Program dan Evaluasi sebagai ;

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan dengan bidang dan UPTD.
- b. Penyusunan data statistik Perkebunan.
- c. Penghimpunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perkebunan.
- d. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perkebunan.
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan (LPPK).
- f. Penyusunan rencana kerja dinas (Renstra, Renja).
- g. Penyusunan laporan kinerja dinas (Lakip).
- h. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan.
- j. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan subag program dan evaluasi sebagai pertanggungjawaban

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Tugas Subbagian Keuangan dan Aset adalah membantu sekretariat dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dan aset lingkup dinas.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Penyusunan dan pengelolaan anggaran rumah tangga dinas
- b. Penataan dan pengelolaan administrasi keuangan dan asset
- c. Penyusunan laporan Pelaksanaan Anggaran Dinas
- d. Pembantuan mengawasi Pengelolaan Anggaran Pembangunan
- e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan dan aset.
- f. Penyiapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- g. Penyiapan usulan pengelola kegiatan dan anggaran.
- h. Penyiapan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi.
- i. Penyiapan pelaksanaan sistem pengendalian Internal (SPI)
- j. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan.
- k. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan subag keuangan dan aset sebagai pertanggungjawaban dan,
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan

Tugas bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan adalah membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.

Sedangkan fungsinya sebagai:

- Penyusunan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan kegiatan pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya Perkebunan.
- Pelaksanakan kebijakan, pembinaan, pengawasan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.
- Pelaksanakan kebijakan, pembinaan, pengawasan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.
- Penyusunan kebijakan, strategis pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi pelaku usaha perkebunan.
- Penyusunan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesian sustainable palm oil (ISPO).
- Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
- Penyusunan pertimbangan teknis bahan rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan untuk izin usaha perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) dan izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P).

- Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan.
- Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang dan UPTD.
- Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan dan penyuluhan perkebunan sebagai pertanggungjawaban dan,
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pengembangan dan penyuluhan perkebunan, terdiri dari :

- ❖ Seksi Penataan Sumberdaya Perkebunan.
- ❖ Seksi Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Investasi
- ❖ Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan.

2.1.3. Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan

Tugas bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan adalah membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan dan produksi tanaman perkebunan.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- ✓ Penyusunan kebijakan, strategi Pembinaan dan pengawasan kegiatan produksi benih, budidaya tanaman semusim, rempah, penyegar dan tanaman tahunan.
- ✓ Pelaksanakan kebijakan, pembinaan dan pengawasan di bidang produksi benih, tanaman semusim, rempah penyegar, penyegar dan tanaman tahunan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan produksi benih, budidaya tanaman semusim, rempah, penyegar dan tanaman tahunan.
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang produksi benih, budidaya tanaman semusim, rempah, penyegar dan tanaman tahunan.
- ✓ Pengelolaan kebun sumber daya genetik (SDG) Tanaman Perkebunan.
- ✓ Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.

- ✓ Pengaturan tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- ✓ Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang dan UPTD dan,
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan terdiri dari :

- Seksi Perbenihan
- Seksi Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
- Seksi Tanaman Tahunan.

2.1.4. Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan

Tugas bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan adalah membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, prasarana dan sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisasi pengganggu tanaman, pengelolaan lahan dan air.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- ✓ Penyusunan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan, pengelolaan lahan dan air.
- ✓ Pelaksanaan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan Pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan, pengelolaan lahan dan air.
- ✓ Pelaksanakan evaluasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) Perkebunan, pengelolaan lahan dan air.
- ✓ Pelaksanaan pengawasan regulasi bidang perkebunan oleh (penyidik pegawai negeri sipil PPNS).

- ✓ Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang prasarana sarana dan perlindungan perkebunan.
- ✓ Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang lain serta UPTD.
- ✓ Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan.
- ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan bidang prasarana sarana dan perlindungan perkebunan sebagai pertanggungjawaban.
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan lahan dan Perlindungan Perkebunan, terdiri dari :

- Seksi Pupuk, Pestisida dan Prasarana Sarana Perkebunan
- Seksi Penanganan Gangguan Usaha dan OPT Perkebunan
- Seksi Pengelolaan Lahan dan Air.

2.1.5. Bidang Pengolahan, Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Tugas bidang Pengolahan, Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan adalah membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu serta pemasaran hasil Perkebunan. Sedangkan fungsinya sebagai ;

- ✓ Penyusunan kebijakan, strategi pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil perkebunan.
- ✓ Pelaksanaan kebijakan, strategi pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil perkebunan.
- ✓ Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil perkebunan.

- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil Perkebunan.
- ✓ Pelaksanaan fasilitasi pembentukan unit pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- ✓ Pelaksanaan koordinasi perumusan dan harmonisasi penerapan standar mutu hasil perkebunan.
- ✓ Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
- ✓ Pengaturan tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- ✓ Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang dan UPTD.
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengolahan, Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan
2. Seksi Standardisasi dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan
3. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan

2.1.6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No.17 Tahun 2009, Dinas Perkebunan memiliki dua (2) UPTD yaitu :

1. Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB)

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Perkebunan dalam bidang pelayanan sertifikasi benih, penilaian mutu benih dan mengawasi peredarannya, memberikan bimbingan pengawasan dan pengembangan mutu benih.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Perencanaan, evaluasi dan bimbingan pengawasan perbenihan tanaman perkebunan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang perbenihan tanaman perkebunan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Pelaksanaan Pengujian mutu benih pada laboratorium benih.
- c. Pelaksanaan Pelayanan, operasional, sertifikasi benih dalam rangka menghasilkan benih bermutu dan bersertifikasi.
- d. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan mutu benih.
- e. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih perkebunan.
- f. Penilai sumber benih tanaman perkebunan.
- g. Penerbitan rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih komoditi Perkebunan.
- h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Balai.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP)

Balai Pengujian dan Pengembangan teknologi Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Perkebunan dibidang pengujian dan pengembangan teknis perlindungan perkebunan.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Perencanaan dan evaluasi serta bimbingan di bidang pengujian teknis dan pengembangan teknologi perlindungan perkebunan.
- b. Pelaksanaan pengujian dan pengembangan teknologi pengendalian hayati.
- c. Pelaksanaan pengembangan koleksi OPT, Agen Hayati dan Pestisida nabati.

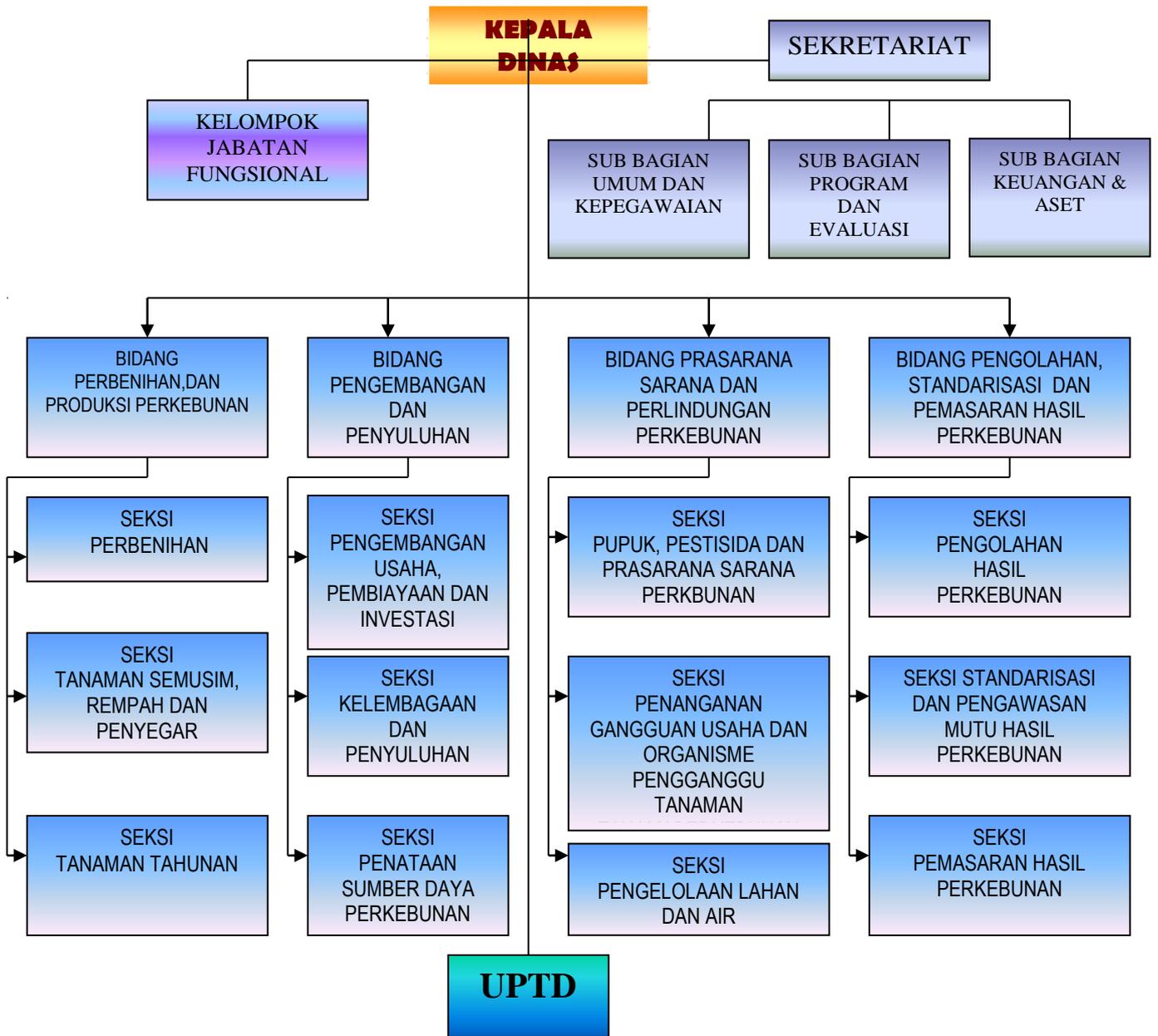
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan hama terpadu (PHT) dan pengujian serta penerapan metode pengamatan dan pengendalian OPT.

2.1.7. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian. Sampai tahun 2018 jumlah tenaga Fungsional Teknis dinas Perkebunan Provinsi Jambi baru tersedia 17 (tujuh belas) orang PNS yang tersebar pada setiap bidang.

2.1.8. Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, maka struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sesuai gambar berikut:



2.2. Kepegawaian Dinas Perkebunan

Dalam pelaksanaan tugas kegiatan pembangunan, masing-masing Bidang, Sekretariat dan UPTD mengacu kepada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan-Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Secara umum, susunan Kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

No	Tingkat Jabata	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Eselon II	1	Kepala Dinas
2	Eselon III	7	Sekretaris, Kepala Bidang , dan Kepala UPTD
3	Eselon IV	21	Kasubbag dan Kasi
4	Fungsional	17	PPS dan PMHP
5	Staf	74	Sarjana dan non Sarjana
6	TKS dan PLTKP	43	Sarjana dan non Sarjana

*)Sumber data : data olahan dinas Perkebunan Prov. Jambi tahun 2018

Berdasarkan status dan golongannya, kondisi pegawai Dinas Perkebunan Propinsi Jambi dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jumlah Aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan Kepangkatan Keadaan s/d Akhir Tahun 2018.

NO.	STATUS APARATUR	GOLONGAN KEPANGKATAN					JUMLAH
		IV	III	II	I	Hnr	
1.	PNS	21	74	24	1	0	120
2.	CPNS	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	21	74	24	1	0	120

*)Sumber data : data olahan dinas Perkebunan Prov. Jambi tahun 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menduduki golongan III (61,6 %), diikuti dengan golongan II (20,0 %), golongan IV (17,0 %) , dan golongan I (1,0 %).

Sementara itu berdasarkan tingkat pendidikan, distribusi aparatur Dinas Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Jumlah Aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Menurut Tingkat Pendidikan Keadaan s/d Akhir Tahun 2017.

NO.	STATUS APARATUR	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		S2	S1	D.3	SLTA	SLTP	SD	
1.	PNS	9	73	1	36	0	1	120
2.	CPNS	0	0	0	0	0	0	0
J U M L A H		9	73	1	36		1	120

*)Sumber data : data olahan dinas Perkebunan Prov. Jambi tahun 2018

Dari table tersebut terlihat bahwa mayoritas aparatur Dinas Perkebunan Propinsi Jambi memiliki tingkat pendidikan S2 (7,50 %), S1 (60,83 %), diikuti dengan SLTA (30,0 %), D3 (0,8 %) , SLTP (0 %), dan SD (0,8 %).

Untuk meningkatkan kualitas/kemampuan sumber daya manusia aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam bidang teknis maupun manajerial telah dilaksanakan pendidikan maupun pelatihan formal dan non formal.

Jumlah Pegawai yang tercatat mencapai 163 orang, dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dilengkapi dengan sarana kerja yang cukup lengkap akan tetapi saat ini kondisi sarana kerja tersebut sebagian besar dalam keadaan rusak ringan hingga berat. Untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin besar dimasa yang akan datang diperlukan penambahan sarana kerja yang lebih memadai.

Sarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi saat ini dapat terlihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Kelengkapan Sarana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

No	Jenis Sarana Kerja	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	1.343.318 M ²	-Sebagian besar blm bersertifikat
2	Bangunan	682 unit	- 249 unit rusak berat -190 unit rusak ringan -10 unit dipakai Pemkab.
3	Alat Berat	31 unit	- 25 unit rusak berat -6 unit rusak ringan
4	Alat Angkut	449 unit	-249 unit, baik -129 unit rusak berat -71 unit rusak ringan
5	Alat Pertanian	2.826 unit	-2820 unit rusak berat -4 unit rusak ringan -2 unit , baik
6	Alat Pengolah Data	54 unit	-33 unit rusak berat -13 unit rusak ringan -8 unit baik
7	Alat Laboratorium	8.335 unit	-7385 unit baik -27 unit rusak ringan -903 unit rusak berat
8	Alat Rumah Tangga dan Kantor	6.150 unit	320 unit baik 244 unit rusak ringan 5475 unit rusak berat
9	Alat Bengkel dan Ukur	98 unit	-97 unit rusak berat -1 unit rusak ringan

2.3. Perencanaan dan Evaluasi

Dibidang perencanaan dan evaluasi, langkah awal yang harus dilaksanakan adalah penyusunan program pembangunan perkebunan yang terarah, menyeluruh dan sistematis dengan didukung oleh data yang lengkap dan akurat. Berkenaan dengan hal tersebut maka upaya peningkatan, pengembangan serta penyempurnaan data perlu mendapatkan perhatian khusus. Disamping itu monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan pembangunan perkebunan sebagai upaya memperoleh masukan guna perbaikan program kedepan harus dilaksanakan secara intensif. Dengan demikian hasil identifikasi dan analisa akan lebih mendekati fakta di lapangan sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan selanjutnya.

Pada tahun 2018 telah disusun Rencana Kinerja (Renja) Pembangunan Perkebunan 2019, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2018, Penyusunan Bahan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Gubernur Jambi Sub Sektor Perkebunan Tahun 2018, Statistik Perkebunan Tahun 2017 (Angka Tetap), Statistik Perkebunan Tahun 2018 (Angka Sementara), dan Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2018.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan

3.1.1. Bidang Sekretariat

Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Sekretariat, umumnya merupakan kegiatan operasional penunjang pelayanan administrasi perkantoran dan penunjang kegiatan yang memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dan peningkatan kinerja dinas perkebunan. Dukungan dana APBN yang berasal dari dana Dekonsentrasi terdapat 1 program dengan 9 kegiatan dukungan perlindungan perkebunan operasional brigade proteksi tanaman perkebunan operasional brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun penunjang administrasi kegiatan dan dukungan kegiatan penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan aset perkebunan, pengelolaan data informasi dan Statistik perkebunan, insentif Mantri Statistik perkebunan, monev dan pelaporan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.137.800.000,00,-. Dan dana tugas pembantuan (TP) dengan total anggaran Rp. 23.594.334.000 terdapat 1 program dan 6 kegiatan antara lain Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Dukungan Perlindungan Perkebunan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah, Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan rincian serapan anggaran sebesar **87,26 %** dan realisasi fisik mencapai **93,35 %**. Adapun kendala yang terjadi didalam penyerapan dana ini adalah terkait dengan gagal tender kegiatan Intercropping jagung di sela tanaman karet di Kabupaten Batanghari seluas 100 ha dan Kabupaten Sarolangun 290 Ha,

Pengembangan tanaman nilam di kabupaten kerinci, keterlambatan pengajuan knapsack sprayer di KPPN dan sisa tender .

3.1.2. Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pengembangan dan penyuluhan perkebunan pada tahun 2018 didukung oleh program dan kegiatan yang didanai melalui dana APBN (DK dan TP) terdapat 1 program khusus dan 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.701.636.000 Output dari kegiatan APBN DK dan TP ini meliputi ;

1. Peremajaan Tanaman Kelapa 730 Ha
2. Seleksi Fasilitator Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)
3. TKP dan PKP-TKP fasilitasi pembangunan perkebunan
4. Pengembangan Tanaman Tebu 60 Ha
5. Pengembangan Tanaman Nilam 20 Ha
6. Pengembangan Tanaman Tembakau 10 Ha

Sampai akhir tahun anggaran 2018 capaian kinerja program dan kegiatan bidang Pengembangan dan penyuluhan perkebunan mencapai 86,87 % realisasi fisik mencapai 87,74 %. Realisasi keuangan tersebut masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 617.444.850,00,-. Terdapatnya sisa anggaran pada kegiatan disebabkan oleh gagalnya tender pengembangan tanaman nilam, adanya selisih biaya dari biaya penawaran pihak ke-3 pada pengadaan peremajaan tanaman kelapa dan biaya perjalanan dinas,. Sisa anggaran tersebut selanjutnya disetorkan kepada Kas Negara.

3.1.3 Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan pada Tahun 2018 mendapat alokasi dana dukungan dari dana Tugas Pembantuan APBN meliputi 1 (satu) Program khusus yaitu program Peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan dan 3 (empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 13.660.058.000,00,-. Output dari program dan kegiatan ini meliputi ;

1. Pengembangan Tanaman Kopi seluas 873 Ha

2. Pengembangan Tanaman Karet seluas 390 Ha
3. Pemeliharaan Kegun Sumber Benih Tanaman Perkebunan seluas seluas 50 Ha.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, capaian kinerja program dan kegiatan dibidang Perbenihan dan Produksi mencapai serapan anggaran 85,31 % dan realisasi fisik mencapai 88.45 %, sisa anggaran sebesar Rp. 2.007.260.408,00,- terdapat sisa anggaran pada kegiatan intercropping jagung di sela karet disebabkan oleh gagalnya tender, keterlambatan pengajuan di KPPN knapsack sprayer, sisa tender perluasan kopi dan biaya operasional ke lapangan berupa perjalanan dinas dan administrasi kegiatan.

3.1.4. Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan

Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan (PSPP) pada tahun 2018 mendapat alokasi anggaran melalui APBN sebesar Rp. 1.466.125.000,- yang dialokasikan pada 1 (satu) Program dan 3 (tiga) kegiatan berupa dukungan teknis perlindungan perkebunan. Adapun output dari kegiatan APBN ini meliputi ;

1. Operasional Brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun
2. Penanganan gangguan dan konflik usaha perkebunan
3. Demlot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (2 lokasi)

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, capaian kinerja program dan kegiatan dibidang PSPP serapan anggaran dana APBN Dekonsentrasi tercatat sebesar 87.50 % dengan realisasi fisik juga 90.45 %. Sedangkan serapan anggaran dana APBN-TP mencapai 79,05 % dan realisasi fisik mencapai 85,45 %, sisa anggaran sebesar Rp. 240.261.400,00,- Sisa anggaran APBN TP ini disebabkan oleh kurang optimalnya pemakaian dana operasional brigade ke lapangan pada kegiatan yang terkait dengan Pencegahan kebakaran lahan dan kebun dikarenakan memasuki 3 bulan terakhir tahun 2018 kegiatan dilapangan sudah dikurangi mengingat cuaca berupa hujan turut mendukung untuk pencegahan kebakaran lahan dan kebun. Selanjutnya sisa anggaran ini semua dikembalikan ke Kas Negara.

3.1.5. Bidang Pengolahan, Standarisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Bidang Pengolahan, Standarisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PSPHP) pada tahun 2018 mendapat alokasi dana APBN-TP terdapat 1 program dan 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.245.434.000,00,- dengan output kegiatan sebagai berikut ;

1. Penyediaan alat pasca panen komoditas perkebunan, berupa penanganan pascapanen karet 5 kelompok tani.
2. Penyediaan alat pengolahan hasil perkebunan, berupa ;
 - a. Pengolahan Kopi 1 unit di Kab. Merangin
 - b. Pengolahan karet 1 unit di Kab. Sarolangun
 - c. Pengolahan Kelapa 1 unit di Kab. Tanjung Jabung Barat
3. Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan 2 kegiatan
4. Fasilitasi Pengembangan Akses Pasar, Unit Pemasaran, komoditas dan pelayanan informasi pasar hasil perkebunan
 - a. Fasilitas pemasaran karet melalui UPPB
 - b. Fasilitas Pengembangan Agrowisata
 - c. Fasilitas Pertemuan dan koordinasi penetapan TBS kelapa sawit
 - d. Pengembangan pelayanan informasi pasar (PIP) komoditas perkebunan

Sampai akhir tahun anggaran 2018 dengan rincian serapan anggaran sebesar 96,04 %. dan realisasi fisik mencapai 97,03 %, Sisa anggaran tercatat sebesar Rp.88.844.187,00,- terdapatnya sisa anggaran pada kedua sumber dana tersebut dikarenakan adanya sisa biaya penawaran pihak ke-3 dan terbatasnya waktu yang tersedia untuk kegiatan pembinaan, pengawalan dan monitoring yang diakibatkan kendala cuaca, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan sepenuhnya.

3.1.6. Balai Pengawasan dan pengembangan Mutu Benih (BP2 MB)

Untuk tahun 2018 program dan kegiatan yang ada di UPTD BP2MB yang meliputi Program Peningkatan produksi dan Teknologi budidaya perkebunan dengan kegiatan Pengawasan peredaran Benih dan Mutu benih perkebunan, dan Kegiatan Pengembangan mutu benih perkebunan dengan total dukungan anggaran dari dana APBN-TP sebesar Rp. 677.130.000,00,- dengan kegiatan berupa

1. Identifikasi, penilaian, pemurnian dan penetapan kebun sumber benih tanaman perkebunan
2. Fasilitasi penilaian, pelepasan, penarikan dan pengembangan varietas benih tanaman perkebunan
3. Fasilitasi pembinaan, pengawasan dan sertifikasi mutu benih tanaman perkebunan
4. Fasilitasi pembinaan kelembagaan kelembagaan pengawas benih

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, capaian kinerja program dan kegiatan di BP2MB dengan rincian serapan anggaran APBN-TP tercatat 78,17 % dan realisasi fisik mencapai 85,40 %.

3.1.7. Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (BPTP)

Pada UPTD BPTP tahun 2018 melalui Program Peningkatan produksi dan Teknologi budidaya perkebunan dengan Kegiatan Pembinaan, pengamatan, pengendalian OPT Perkebunan dan operasional UPPT dan UPTD-LH; dan Bimbingan teknologi perbanyak dan aplikasi agent hayati dengan dukungan anggaran dana APBN-DK sebesar Rp. 428.250.000,00,- dengan kegiatan berupa Fasilitasi operasional Laboratorium Lapangan (LL), Fasilitasi operasional brigade proteksi tanaman perkebunan, dan dari dana APBN-TP sebesar Rp. 1.342.400.000,00,- dengan kegiatan berupa

1. Gerakan pengendalian OPT tanaman karet (penyakit JAP) 200 Ha di Kab. Tebo
2. Pengembangan desa pertanian organic berbasis komoditas perkebunan 3 desa
3. Fasilitas teknis dukungan perlindungan perkebunan.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, capaian kinerja program dan kegiatan di BP2TP2 mencapai 97,75 % dengan rincian serapan anggaran APBN-DK mencapai 100,0 % dan realisasi fisik juga 100,0 %, dari dana APBN-TP serapan dana mencapai 96,54 % dengan realisasi fisik 100,0 %.

3.2. Keuangan

3.2.1. Pendapatan

Target pendapatan dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2018 sebesar Rp.1.665.000.000,00,-, yang diperoleh melalui Retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa produk Komoditi Karet, Kopi bubuk dan bibit kelapa Sawit, dengan rincian sebagai berikut :

- Karet : Rp. 50.000.000,00,-
- Kopi bubuk : Rp. 15.000.000,00,-
- Bibit K.Sawit : Rp.1.600.000.000,00,-

Sampai dengan akhir TA. 2018, dicapai pendapatan dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebesar Rp. 1.662.113.800,00,- (99,83 %) dengan rincian sebagai berikut ;

- Karet : Rp. 49.309.800,00,-
- Kopi bubuk : Rp. 55.420.700,00,-
- Bibit K.Sawit : Rp.1.557.383.300,00,-

3.2.2. Belanja

Belanja dari dana APBN tercatat sebesar Rp. 28.295.966.000,00,- yang terdiri dari :

- Dana Dekonsentrasi : Rp. 2.137.800.000,00,-
- Dana Tugas Pembantuan : Rp. 23.594.334.000,00,-

Sehingga secara keseluruhan total Belanja yang dikelola oleh dinas Perkebunan Provinsi Jambi tercatat sebesar Rp. **25.732.134.000,-**

Alokasikan dana untuk tahun 2018 yang bersumber dari dana APBN pusat mengalami penurunan sebesar - 9,90 % bila dibandingkan tahun 2017 dalam rangka percepatan pencapaian pelaksanaan program-program prioritas nasional yang tertuang didalam RPJMN 2014-2019.

Sampai akhir tahun anggaran 2018, realisasi penggunaan dana kegiatan pembangunan perkebunan APBN Dekon tercatat **94,41 %** dan APBN TP tercatat **87,26 %** untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :

Tabel. 7. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi TA. 2018

NO	Tujuan	Program	Pagu	Realisasi	(%)	Fisik	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Meningkatkan produksi, produktivitas perkebunan dan nilai tukar petani untuk kesejahteraan petani	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (TP)	23,594,334,000	20,436,603,753	86.62	91.75	APBN TP	
		Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	15,907,580,000	13,945,754,138	87.67	98.45	APBN TP	
		Dukungan Perlindungan Perkebunan	2,020,775,000	1,803,308,700	89.24	100.00	APBN TP	
		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	1,130,600,000	1,130,529,300	99.99	100.00	APBN TP	
		Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	776,736,000	427,601,250	55.05	61.45	APBN TP	
		Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	2,245,435,000	2,156,590,811	96.04	100.00	APBN TP	
		Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	1,513,208,000	972,819,554	64.29	71.00	APBN TP	
		Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (DK)	2,137,800,000	2,018,275,658	94.41	100.00	APBN DK	
		Dukungan Perlindungan Perkebunan	1,216,000,000	1,114,442,800	91.65	100.00	APBN DK	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	921,800,000	903,832,858	98.05	100.00	APBN DK			
		TOTAL	25,732,134,000	22,454,879,411	87.26	93.85		

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi periode 2016-2021 menuju visinya mewujudkan Jambi TUNTAS 2021. Segenap upaya mempertahankan, memelihara dan meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta memperhatikan berbagai permasalahan yang berkembang selama proses pembangunan itu sendiri tentunya memerlukan perjuangan dan komitmen kita bersama.
2. Capaian kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan pembangunan Dinas Perkebunan untuk tahun 201 mencapai **87,26 %** atau dikategorikan **kurang baik**.
3. Visi Dinas Perkebunan diimplementasikan melalui alokasi dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) dilaksanakan 1 program khusus, yaitu Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan.

5.2. Saran

1. Untuk meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi Perkebunan maka penggunaan bahan tanam yang kualitas tinggi harus lebih ditingkatkan melalui peningkatan ketersediaan bahan tanam tersebut di lapangan dengan harga yang terjangkau oleh petani.
2. Upaya-upaya berupa terobosan-terobosan untuk membuka akses permodalan bagi petani dalam kegiatan usahatannya baik melalui pola pembangunan yang telah ada maupun memfasilitasi terjalinnya kemitraan antara petani dan pemodal termasuk perbankan harus lebih ditingkatkan.
3. Peningkatan sumberdaya manusia petani termasuk kelembagaannya perlu terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan posisi tawar petani dan membangun kepercayaan pihak lain terhadap kredibilitas kelembagaan petani, serta menciptakan kemandirian dalam melaksanakan kegiatan usahatannya.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target		Realisasi		Prosentase volume (Rp)
1	meningkatnya Produksi dan Daya Saing Komoditas Perkebunan	1	Tanaman Tahunan dan Penyegar Pengembangan Tanaman Kopi	873	Hektar	873	Hektar	100%
		2	pengembangan Tanaman Karet	390	Hektar	390	Hektar	100%
		3	Pengembangan Tanaman Kelapa	730	Hektar	730	Hektar	100%
		4	Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	12	Bulan	12	Bulan	100%
		5	Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	200	Hektar	200	Hektar	100%
		6	penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	2	KT	2	KT	100%
		7	Pengembangan Desa Petani Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	3	Desa	3	Desa	100%
		8	Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan	12	Bulan	12	Bulan	100%
		9	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	1	Provinsi	1	Provinsi	100%
		10	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	12	Bulan	12	Bulan	100%
		11	Pengembangan Tanaman semusim dan Rempah	60	Hektar	60	Hektar	100%
		12	Pengembangan Tanaman semusim dan Rempah Lainnya	20	Hektar	-	-	-
		13	Fasilitas Pascapanen Tanaman Perkebunan	5	KT	5	KT	100%
		14	Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	3	Unit	3	Unit	100%
		15	Pengembangan Penerapan Standarisasi Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100%
		16	Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100%
		17	Penyedia Benih Unggul Tanaman Perkebunan	90	Hektar	86	Hektar	95.55%

Program
Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

Anggaran
Rp. 25.732.134.000